



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA AKSI NASIONAL PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2019 - 2024 (RAN KSB)

**SINERGI IMPLEMENTASI OLEH ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH**

Jakarta, 29 Januari 2020

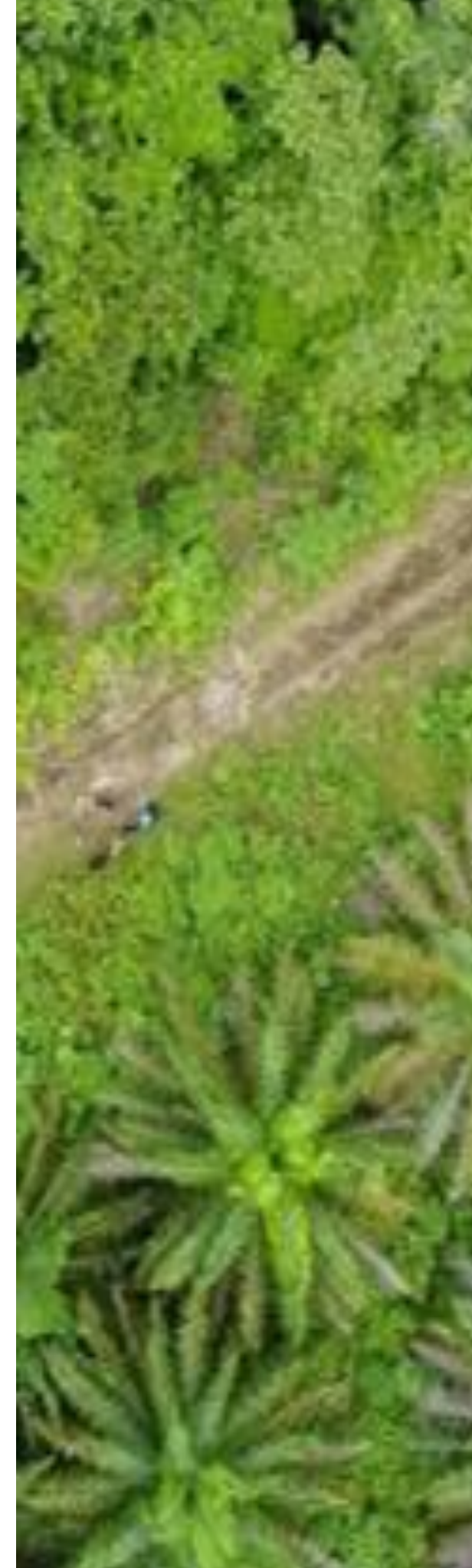


- Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Instruksi Presiden No.6/2019 terkait dengan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019 - 2024 (RAN-KSB).
- Akan dibentuk Tim Nasional Pelaksana RAN-KSB.
- Strategi: pendekatan multi pihak yang dikoordinir oleh pemerintah melibatkan pelaku usaha (pengusaha & pekebun), asosiasi dan organisasi kemasyarakatan.



RAN KSB

- Peta jalan menuju perbaikan produksi kelapa sawit berkelanjutan
- Acuan bagi pemerintah, pelaku usaha, CSOs dan lembaga pembangunan internasional dalam mendukung pengembangan kelapa sawit berkelanjutan 2024
- Disusun bersama oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, yang tergabung dalam FoKSBI.





Penguatan Data, Koordinasi & Infrastruktur



Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun



Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan



Tata Kelola & Penanganan Sengketa



Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO

A. Penguatan Data, Koordinasi & Infrastruktur



Penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit



Pembinaan penyelenggaraan informasi geospasial tematik



Sosialisasi Regulasi & Kebijakan



Peningkatan sinergitas antar kementerian/lembaga/pemda



Pembentukan forum multipihak kelapa sawit di propinsi & kabupaten

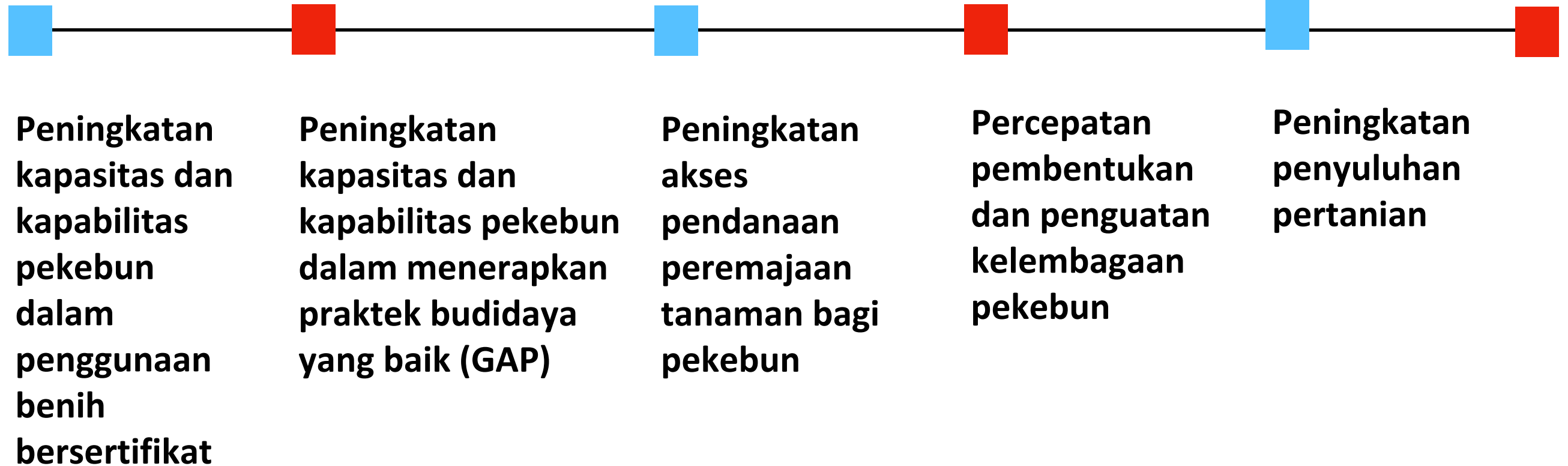


Pembangunan infrastruktur jalan



Peningkatan Kepatuhan Hukum bagi Pelaku usaha

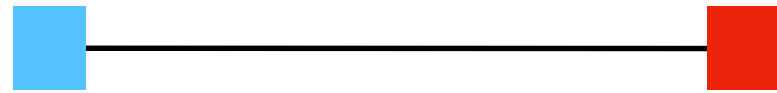
B. Peningkatan Kapasitas & Kapabilitas Pekebun



C. Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan

- Peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan lansekap perkebunan
- Pelaksanaan pencegahan kebakaran kebun dan lahan
- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)
- MRV (measurement, reporting, and verification) potensi penurunan emisi GRK
- Peningkatan pemanfaatan lahan kritis
- Pemanfaatan limbah kelapa sawit
- Peningkatan pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai energi terbarukan

D. Tata Kelola Perkebunan dan Penanganan Sengketa



- Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat
- Melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit
- Penyelesaian status lahan perkebunan kelapa sawit berada di dalam kawasan hutan
- Legalisasi aset hasil penyelesaian status perkebunan yang berada di kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan.
- Penyelesaian status lahan dan usaha perkebunan di ekosistem gambut
- Pelaksanaan review regulasi ketenagakerjaan, monitoring pelaksanaan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit

E. Percepatan Pelaksanaan ISPO & Akses Pasar



Pelaksanaan sosialisasi ISPO
untuk pemangku
kepentingan nasional



Percepatan pelaksanaan
sertifikasi ISPO untuk
perusahaan dan pekebun



Penyelenggaraan diplomasi,
promosi dan advokasi untuk
keberterimaan ISPO

PENDANAAN DAN TARGET LOKASI (2019 -2024)



Pendanaan :

APBN, APBD, BPDPKS, Yayasan Nirlaba, Perusahaan Kelapa Sawit, Sumber sumber lain yang sah.



Sasaran implementasi terutama di 26 provinsi sentra penghasil kelapa sawit Indonesia :

(1) Aceh, (2) Sumatera Utara, (3) Riau, (4) Kepulauan Riau, (5) Jambi, (6) Sumatera Selatan, (7) Bengkulu, (8) Sumatera Barat, (9) Bangka Belitung, (10) Lampung, (11) Banten, (12) Jawa Barat, (13) Kalimantan Barat, (14) Kalimantan Tengah, (15) Kalimantan Selatan, (16) Kalimantan Timur, (17) Kalimantan Utara, (18) Sulawesi Selatan, (19) Sulawesi Tengah, (20) Sulawesi Barat, (21) Sulawesi Tenggara, (22) Gorontalo, (23) Maluku, (24) Maluku Utara, (25) Papua, (26) Papua Barat.

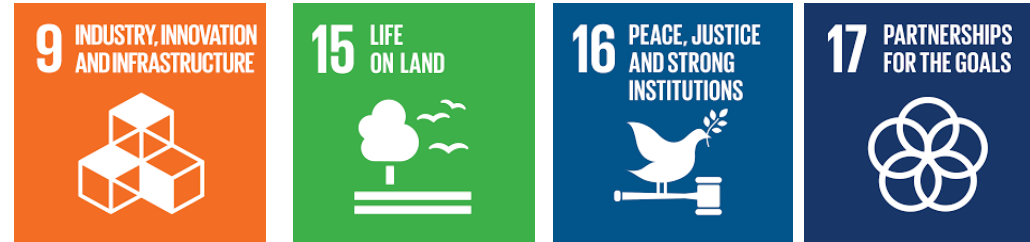
PERAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM IMPLEMENTASI RAN-KSB

- Menyusun Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat provinsi/kabupaten/kota penghasil kelapa sawit dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit.
- Berkontribusi mendukung pelaksanaan kegiatan RAN-KSB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Inpres no. 6/2019.
- Membentuk tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multi pihak kelapa sawit berkelanjutan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota penghasil kelapa sawit (pada tahun 2020). Didukung oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan pelaku usaha.



RAN KSB & SDGs

Penguatan Data, Koordinasi & Infrastruktur



Peningatan Kapasitas & Kapabilitas Pekebun



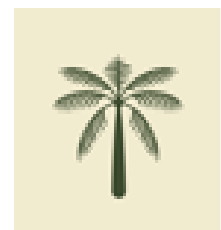
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan



Tata Kelola & Penanganan Sengketa



Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi ISPO & Akses Pasar





TERIMA KASIH